

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Rafika Trisha Ananda, Bujang Rahman, Alben Ambarita

FKIP Unila : Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung

e-mail : [fikaananda12@gmail.com](mailto:fikaananda12@gmail.com)

HP : 085269838883

This study aims to identify and analyze the policy of the City Government development program in schools Bandar Lampung, Bandar Lampung. The research is a qualitative description of the case study method approach using multi-site conducted at SMPN 1 and 12, Bandar Lampung. The technique of collecting data through observation, documentation and interview. Data Source Derived from principals, vice-principals, teachers, administrators, parents and learners. The results of this study indicate that (1) each school has a different system in the process of receiving new students that are customized to the needs and abilities of school, (2) each school has strategies in meeting the quota of 50% acceptance of new learners, including in terms of placement classes, (3) supporting factors and obstacles in the implementation of community development programs.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan program bina lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung di sekolah, Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif menggunakan metode studi kasus pendekatan multi situs yang dilakukan di SMPN 1 dan 12 Kota Bandar Lampung dan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data Berasal dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, orang tua dan peserta didik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) setiap sekolah memiliki sistem yang berbeda dalam proses penerimaan peserta didik baru yang di sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah, (2) masing-masing sekolah memiliki strategi dalam memenuhi kuota 50% penerimaan peserta didik baru, termasuk dalam hal penempatan kelas, (3) faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan program bina lingkungan.

**Kata Kunci:** kebijakan, bina lingkungan, peserta didik

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor penting dan bisa menjadi sarana untuk peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia. Berbagai masalah dan tantangan dalam pendidikan dasar dapat diatasi oleh pemerintah dengan melahirkan berbagai kebijakan dan program yang bisa mengurangi masalah secara bertahap, seperti masalah mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, relevansi, efektivitas dan efisiensi pendidikan.

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Manusia berkualitas seperti yang diharapkan di atas, hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang komprehensif, terpadu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungannya, perlu ada perubahan sosial yang memberi arah bahwa pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam proses perubahan itu. Pendidikan adalah kehidupan, untuk itu kegiatan belajar harus mengacu pada lingkungan kebutuhan peserta didik.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan segala aspek kehidupan manusia, yang menyangkut setiap individu. Hal ini dikarenakan pendidikan berperan dan berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan manusia dengan seluruh aspek kepribadiannya, dengan kata lain pendidikan menentukan model manusia yang akan dihasilkannya.

Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan dengan kesempatan yang sama. Menurut Rahman (2010:1) pendidikan adalah salah satu bentuk "*human investment*" yang dapat meningkatkan kualitas hidup (*quality*

*of life*) baik secara individu maupun keluarga, maupun sebagai bangsa.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa jenjang pendidikan dapat meningkatkan pendapatan seorang individu maupun keluarga, meskipun tidak bersifat mutlak, karena kualitas hidup dipengaruhi oleh banyak variabel seperti peluang pasar kerja, kondisi sosial ekonomi baik mikro maupun makro. Menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan tidak mudah, pasti memerlukan usaha dan pengorbanan serta membutuhkan proses pendidikan.

Pentingnya pendidikan juga dikemukakan Sihombing (2003:13) yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang diharapkan dari pendidikan, yaitu : 1) pendidikan diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaku utama yang dapat menciptakan kemajuan dan perkembangan, 2) pendidikan diharapkan dapat memberikan warna dan identitas bangsanya, 3) pendidikan diharapkan dapat menghasilkan naiknya tingkat kesejahteraan, meningkatkan status sosial dan nilai diri yang diperolehnya, sehingga dianggap penting untuk membuat tahapan dalam perencanaan pendidikan agar program atau kebijakan yang dibuat pemerintah menjadi tepat sasaran.

### **Kebijakan Publik**

Abidin (2006:17) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Dunn, 1999).

Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan

hukum (*Law*) dan peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Dunn (2000:132) menyimpulkan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung termasuk keputusan. Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya sehingga *policy* lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata *wisdom* (Islamy, 1997:5).

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

Abidin menyimpulkan (2006:22) bahwa kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu: pemerintah, masyarakat dan umum. Sehingga dapat penulis simpulkan pemaknaan ini mencakup subjek, objek dan lingkungan dari kebijakan, oleh karena itu kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi, dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah hasil

pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manajer dan personil dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat, artinya keputusan strategis yang ditetapkan sebelumnya untuk menjadi patokan pelaksanaan manajemen kehidupan masyarakat luas.

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi, sedangkan kebijakan pendidikan merupakan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan pada masyarakat dalam kurun waktu tertentu (Nugroho R, 2004 : 1-7).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.

### **Fungsi dan Jenjang Kebijakan**

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*policy making*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input

(masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai : (1) pedoman untuk bertindak (2) pembatas perilaku dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan Pongtuluran (1995:7). Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

Menurut Pongtuluran (1995 : 8) Kebijakan adalah produk pengambilan keputusan strategis maka jenjang kebijakan dihubungkan dengan jenjang manajemen, yaitu :

1) Manajemen puncak. Kebijakan yang disusun oleh jenjang ini berasal dari hampir semua sumber. Kebijakan ini mempunyai kepentingan yang tinggi dan kekhususan yang rendah. Kebijakan ini cenderung bersifat umum dan utamanya memiliki wawasan untuk eksternal yang berhubungan dengan keuangan, hubungan masyarakat dan penelitian.

2) Manajemen menengah. Kebijakan ini cenderung mengikuti perintah atau referensi dari manajemen puncak atau manajemen menengah, sumbernya dapat berasal dari sejarah, budaya atau pendahulunya.

3) Manajemen Operasi. Kebijakan yang ditetapkan pada jenjang ini biasanya berlaku untuk kegiatan operasi dan bidang fungsi semua organisasi. Kebijakan operasi berasal dari jenjang bawah, sebab itu kurang tegas dan penting, tetapi lebih khusus dari kebijakan yang lebih tinggi.

### **Pendekatan dan Model Kebijakan**

Dunn (2000 : 135) menjelaskan ada sejumlah model analisis kebijakan model

kebijakan yang bisa dijadikan rujukan , (1) Model deskriptif, (2) Model normatif, (3) Model Verbal, (4) Model simbolis, sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan bermanfaat untuk menyederhanakan sistem masalah dengan mampu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para ahli kebijakan. Manfaat lain adalah untuk membantu membedakan hal yang esensial, mempertegas hubungan antar faktor dan variabel penting, dan mampu menjelaskan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan kebijakan.

### **Strategi Kebijakan**

Menurut Salusu (2003 : 85) Strategis berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *strategeus*. *Srategos* berarti jenderal, namun dalam Yunani kuno sering berarti perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas. Sedangkan Raben (2000 : 15) mendefinisikan strategi sebagai kerangka kerja (*frame work*), teknik dan rencana yang bersifat spesifik atau khusus.

Pengertian strategi di atas menunjukkan ada hal yang menarik, yaitu adanya penyesuaian keputusan strategi dengan lingkungan, baik yang berupa ancaman maupun peluang. Hal tersebut menggambarkan bahwa strategi adalah proses yang dinamis, berarti strategi merupakan tindakan untuk menghadapi kondisi lingkungan yang berubah dan berbeda serta merupakan cara untuk menciptakan peluang dan menghadapi ancaman. Penerapan strategi dalam organisasi pendidikan sesungguhnya merupakan paradigma baru dalam perencanaan pendidikan.

Berkaitan dengan penjelasan-penjelasan tentang pengertian tentang strategi yang telah diuraikan, maka secara operasional strategi bisa berarti suatu tindakan untuk menggunakan potensi sumber daya organisasi secara maksimal untuk

mencapai tujuan demi memanfaatkan dan menyesuaikan dengan lingkungan baik berupa peluang maupun ancaman serta tindakan-tindakan itu mampu berpengaruh terhadap sikap masyarakat agar berperilaku seperti yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi.

### **Pengertian program Bina Lingkungan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan siswa peserta didik baru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung, pada BAB V tentang jalur dan sistem seleksi Penerima Peserta Didik baru pasal 10 butir ke (3) jalur bina lingkungan, diperuntukkan bagi :

1. Calon peserta didik baru dari keluarga belum mampu secara ekonomi yang berdomisili dekat dengan sekolah pilihan, dan resmi sebagai warga Kota Bandar Lampung dengan ketentuan:
  - a. Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus PPDB yang telah ditetapkan.
  - b. Memiliki dan menyerahkan fotocopy kartu jamkesmas atau jamkesda yang sah.
  - c. Ada surat keterangan tidak mampu dari lurah atau dari kepala Sekolah Dasar.
  - d. Menyerahkan fotocopy kartu keluarga dan KTP orang tuanya.
  - e. Menyerahkan kartu keluarga yang asli, dan akan dikembalikan pada saat pengumuman.
  - f. Hanya diperkenankan memilih satu sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
2. Anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. Menyerahkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga atau KP4

- b. Menyerahkan fotocopy surat tugas dari satuan pendidikan tempat bertugas.
- c. Memenuhi persyaratan umum/khusus PPDB tahun yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandar Lampung dan program bina lingkungan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan pada bagian keempat mengenai hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada pasal 32 Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Pasal 33 Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan serta pemeliharannya untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. Membantu menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. Menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan pendidikan;
- d. Menyediakan anggaran pendidikan;
- e. Menyelenggarakan wajib belajar.

Pada BAB XII peserta didik bagian satu hak dan kewajiban pasal 34 ayat (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak :

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan dengan memperhatikan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;

- d. Mendapatkan jaminan pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan berstatus sebagai penduduk daerah;

Dalam ayat (7) syarat dan mekanisme memperoleh beasiswa dan jaminan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf c dan d serta syarat dan mekanisme penerimaan peserta didik baru di tiap jenjang dan jalur pendidikan formal diatur dengan Peraturan Walikota. Pada bagian kedua tentang Penerimaan dan Daftar Ulang pasal 35 ayat (4) daya tampung Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, 70 % peserta didik masuk melalui jalur reguler, dan 30 % peserta didik masuk melalui jalur bina lingkungan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Tujuan Program Bina lingkungan**

Program bina lingkungan diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu, peserta didik bina lingkungan yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya pada tiap satuan pendidikan diharapkan mendaftar pada sekolah lanjutan yang berdekatan dengan jarak tempat tinggal ke sekolah. Menurut Nasihin dan Sururi dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (2009:205) peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidikannya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 tahun 2013 pasal 12 paragraf 2 pasal 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tanggal 11

Juni 2013 (1) seleksi calon peserta didik baru kelas 7(tujuh) SMP/SMPLB dapat menggunakan SKHUN SD/MI/SDLB atau nilai akhir pada program paket A, dan dapat juga dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang di akui sekolah, serta memberikan prioritas sampai dengan 50 (lima puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. (2) apabila kriteria pada ayat 1 di atas tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes skolastik atau tes potensi akademik.

### **Penerimaan Peserta Didik Baru**

Peserta didik menurut Hendayat Soetopo dan Wasty Soemanto (1982) adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan/pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas, yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.

### **Kerangka pikir**

Alur kerangka pikir penulis pada gambar dibawah ini penulis jelaskan sebagai berikut : program bina lingkungan adalah salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dan diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pada jalur penerimaan peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan di beberapa sekolah terdapat perbedaan dalam pola rekrutmen dan perbedaan jumlah penerimaan dari kuota yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bandar

Lampung , dimana jumlah kuota yang bertambah setiap tahunnya seperti pada tahun ajaran 201/2013 sebesar 30% , tahun ajaran 2013/2014 ditingkatkan kuotanya menjadi 40%, tahun ajaran 2014/2015 menjadi 50% dan ditahun 2015/2016 sebanyak 70%, sebagai contoh di SMPN 1 Bandar Lampung, SMPN 5 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung yang berada dalam satu sub rayon, berdasarkan data di SMPN 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung, pada proses penerimaan peserta didik baru peserta didik yang mendaftar melalui jalur bina lingkungan kurang dari kuota 50% sehingga untuk memenuhi kuota 50 % SMPN 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung memperoleh tambahan jumlah peserta didik bina lingkungan dari SMPN 5 Bandar Lampung dikarenakan jumlah pendaftar calon peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan lebih dari 50 % , karena seluruh peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur bina lingkungan seluruhnya diterima, sehingga untuk menentukan apakah peserta didik tersebut dapat masuk ke kelas unggulan diberikan tes.

Terdapat perbedaan pada penempatan kelas di kedua sekolah, disamping itu pada tahun ajaran 2015/2016 Pemerintah Kota Bandar Lampung menambah jumlah kuota penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan sebanyak 70 % , tidak meratanya jumlah peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan dan penambahan jumlah kuota penerimaan jalur bina lingkungan secara tidak langsung berpengaruh pada jumlah kuota penerimaan peserta didik baru pada setiap jenjang pendidikan pada sekolah negeri karena peserta didik yang diterima pada jalur reguler menjadi berkurang menjadi 30 % , hal ini tentu mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah, dikarenakan peserta didik yang masuk melalui jalur umum dan prestasi memiliki keunggulan nilai dan prestasi siswa secara

individu karena mereka masuk berdasarkan standar nilai dan prestasi yang mereka miliki.

Di satu sisi Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya memperluas akses pendidikan, namun di sisi lain akan melahirkan produk akademik pada tiap satuan jenjang pendidikan, karena sekolah memiliki tujuan mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan prestasi peserta didik.

Program bina lingkungan memberdayakan lembaga pendidikan sekolah negeri di Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap dan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsi desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat dan lembaga pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. mengembangkan kualitas sumber daya manusia sebagai pendidik secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya pro aktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensi.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Biaya pendidikan memiliki peranan yang juga menentukan keberlangsungan pendidikan peserta didik yang berlatar belakang kurang mampu, kita tidak dapat mengabaikan peran biaya, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak berjalan maksimal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini membahas dan mengkaji kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyetujui program pendidikan bina lingkungan untuk pemerataan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya mengenai sesuatu, keadaan atau fenomena sosial tertentu guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, dengan harapan agar dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan program pemerintah Kota Bandar Lampung tentang program pendidikan bina lingkungan dan dampaknya terhadap mutu serta faktor penghambat atau kendala dalam hal pemerataan pendidikan terutama bagi peserta didik kurang mampu di Kota Bandar Lampung.

## **Pembahasan**

Kedua sekolah memberi gambaran bahwa pada pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :Sebelumnya sekolah membuat tim kerja untuk proses penerimaan peserta didik jalur bina lingkungan yang melibatkan kepala sekolah/wakil kepala sekolah masing masing bidang, guru dan TU, sementara kalau komite hanya mengetahui bahwa sekolah akan ikut melaksanakan program bina lingkungan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Ada beberapa tim yang pertama tim penerima berkas pendaftaran, selanjutnya tim administrasi melakukan seleksi berkas berdasarkan lokasi tempat tinggal, petugas administrasi yang bertugas mengecek seluruh kelengkapan data syarat syarat lainnya yang dirasa belum lengkap dikembalikan survey yang bertugas mengecek, setelah di survey dan dicocokkan datanya maka tim akan

memberikan laporan terhadap hasil survey yang sebelumnya dilakukan kepada tim penerimaan peserta didik baru di sekolah baru dilanjutkan dengan memasukkan data calon peserta didik tersebut.

Hal yang membedakan dari tahun penerimaan peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan di SMPN 1 Bandar Lampung baru menerima siswa bina lingkungan pada tahun ajaran 2013/2014 sedangkan SMPN 12 Bandar Lampung sudah melaksanakan program Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung ini pada tahun ajaran 2012/2013. Disamping itu kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung menambah kuota dari semula 30 % menjadi 50% menjadikan sekolah memiliki strategi dalam proses penerimaan peserta didik baru dan menerima limpahan dari sekolah yang kuota peserta didik lebih dari yang ditetapkan.

Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan bagian kedua penerimaan dan daftar ulang pasal 35 butir (1) penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas. Pada butir (4) daya tampung Sekolah dasar dan yang sederajat, Sekolah menengah pertama (SMP) dan yang sederajat, sekolah menengah atas (SMA) dan yang sederajat, 70% siswa masuk melalui jalur reguler, dan 30% siswa masuk melalui jalur bina lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Walikota yang menetapkan kuota penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan sebesar 30 % sementara pada perkembangannya setiap tahun kuota bina lingkungan bertambah menjadi 50 % dan tahun ajaran 2015/2016 jumlah kuota bertambah menjadi 70 % hal ini tentu membuat sekolah membuat sistem penerimaan menyesuaikan dengan program kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memperluas akses pendidikan pada setiap

jenjang pendidikan khususnya di Kota Bandar Lampung dan kebijakan sekolah.

Dalam menjaga mutu sekolah yang harus dipertahankan sekolah mencari strategi penting dalam pelaksanaan proses penerimaan jalur bina lingkungan yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, hal ini perlu dilakukan karena sekolah sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada orang tua siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan di Kota Bandar Lampung namun disisi lain sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga mutu sekolah sebagai wadah untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.

Sekolah menerima seluruh peserta didik dari jalur bina lingkungan dan strategi yang dilakukan pihak sekolah setelah seluruh peserta didik bina lingkungan diterima di sekolah adalah dalam penempatan peserta didik di kelas, sebagai contoh di SMPN 1 Bandar Lampung peserta didik bina lingkungan ditempatkan di kelas 7d dan seterusnya sementara di SMPN 12 Bandar Lampung ditempatkan di kelas 7c dan seterusnya, hal ini dilakukan menyesuaikan dengan visi sekolah untuk mempertahankan kualitas sekolah dan menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik bina Lingkungan.

Sebagai salah satu sekolah unggulan di Kota Bandar Lampung dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) tentu fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sebagai penunjang dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi hal yang juga membedakan dalam proses belajar mengajar di kedua sekolah ini, misalnya kelas yang representatif membuat peserta didik menjadi nyaman di kelas memudahkan guru saat menyampaikan materi, siswa reguler dan peserta didik

jalur prestasi jumlahnya banyak di sekolah ini karena kuota peserta didik bina lingkungan keluarga kurang mampu tidak sebanyak di sekolah SMPN 12 Bandar Lampung meskipun juga menjadi salah satu sekolah yang menerima menerima limpahan peserta didik baru dari sekolah SMPN 5 Bandar Lampung sehingga memudahkan proses belajar karena banyak peserta didik aktif di kelas, peserta didik dari jalur bina lingkungan mau tidak mau ikut menyesuaikan dengan peserta didik lain, sehingga peserta didik bina lingkungan menjadi lebih aktif .

Sementara di SMPN 12 Bandar Lampung pendaftar dari sekolah sudah mencukupi ditambah limpahan dari kuota dari SMPN 5 Bandar Lampung sehingga mencari cara dengan menambah ruang kelas harus dibagi dampaknya ruang kelas menjadi sempit karena kelas dibagi menjadi dua, hal ini dilakukan sekolah agar seluruh peserta didik diterima dan mendapatkan perhatian dari guru di kelas jumlah peserta didik dikelas dibatasi tiap kelasnya menjadi 20 hingga dua puluh lima orang per kelas.

Keterlibatan orang tua di rumah menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan tumbuh kembang anak tidak hanya mengandalkan guru dan pihak sekolah, masih ditemukan pihak sekolah saat pemanggilan pemanggilan orang tua peserta didik bina lingkungan kurang cepat tanggap datang ke sekolah untuk menyelesaikan problematika anak di sekolah sehingga pihak sekolah mendatangi keluarga anak di rumah. Hal ini tentu menjadi hambatan bagi pihak sekolah karena membimbing siswa merupakan tanggung jawab bersama antara pihak sekolah dan orang tua.

Menurut Rahman (2010:1) pendidikan adalah salah satu bentuk "*human investment*" yang dapat meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*) baik secara individu maupun keluarga,

maupun sebagai bangsa. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa jenjang pendidikan dapat meningkatkan pendapatan seorang individu maupun keluarga, meskipun tidak bersifat mutlak, karena kualitas hidup dipengaruhi oleh banyak variabel seperti peluang pasar kerja, kondisi sosial ekonomi baik mikro maupun makro. Menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang di harapkan tidak mudah, pasti memerlukan usaha dan pengorbanan serta membutuhkan proses pendidikan.

Peserta didik bina lingkungan memiliki motivasi belajar yang rendah, kesabaran guru yang mengajar di kelas yang mayoritas peserta didiknya adalah anak bina lingkungan dalam menyampaikan materi pelajaran dan menanamkan motivasi terhadap anak bina lingkungan menjadi suatu keharusan agar peserta didik bukan saja dapat menerima materi yang diajarkan guru di kelas dengan baik namun juga dapat memberikan motivasi kepada guru untuk lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran di kelas.

#### **4.7 Konsep Model Pengembangan Kinerja Guru Melalui pelatihan**

##### **4.7.1 Rasional**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dalam hal ini dikemukakan model hipotetik pengembangan kinerja guru melalui penempatan kelas ajar yang direkonstruksi dan diinterpretasikan dari temuan empirik sehingga menghasilkan sebuah abstraksi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan kinerja guru mengatasi peserta didik bina lingkungan yang mayoritas motivasi belajar rendah.

Menurut Rahman, Tidak bisa dipungkiri bahwa masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh produk pendidikan, terutama sumber daya manusia karena manusia merupakan pelaku utama dalam proses pembangunan sekaligus tujuan akhir pembangunan (2013:1). Kita bisa melihat negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Finlandia, dan Singapura ditopang oleh sistem pendidikan yang kuat dan mapan. Kaitannya dengan urgensi pendidikan dalam pembangunan suatu bangsa, di dalam buku *Workforce 2000 : Work and Workers for the Twenty-first Century* dinyatakan : “..Education and training are the primary system by which the human capital of a nation is preserved and increased..”(Jonston and Packer : 1987). Pendidikan dan pelatihan merupakan cara utama dan paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Model hipotetik ini dibangun berdasarkan kebutuhan peningkatan kinerja guru untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu. Selain itu, model ini dikembangkan berdasarkan pada hasil penelitian yang membuktikan bahwa variabel kepemimpinan kepala sekolah yang dibuktikan melalui kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh paling tinggi terhadap mutu pendidikan, dibandingkan pengaruh iklim sekolah, dan kinerja guru terhadap mutu pendidikan. Dari hasil penelitian ini, bahwa kepemimpinan kebijakan kepala sekolah memiliki pengaruh yang paling tinggi diantara iklim sekolah dan kinerja guru terhadap mutu pendidikan. Oleh karena itu, sukses tidaknya pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola setiap komponen sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah yang sangat berpengaruh dan menentukan kemajuan sekolah harus memiliki kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi, dan luwes

dalam melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik harus dapat mengupayakan peningkatan kinerja guru melalui program pembinaan kemampuan tenaga kependidikan. Menurut Mulyasa (2012:5), sukses tidaknya pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola setiap komponen sekolah (*who is behind the school*). Oleh karena itu, kepala sekolah harus mempunyai kepribadian atau sifat-sifat dan kemampuan serta keterampilan-keterampilan untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan.

Menurut Mulyasa (2009:90), bahwa kepala sekolah berperan utama dalam menggerakkan organisasi sekolah. Kepala sekolah dapat menjalankan tugasnya dengan cukup baik akan berpengaruh terhadap kinerja guru. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor yang dapat mendorong sekolah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

#### 4.7.2 Asumsi

Asumsi yang melandasi pengajuan model hipotetik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manajemen pembinaan kinerja guru harus dilihat sebagai upaya pembelajaran terus menerus guna meningkatkan kemampuan profesional guru sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pembinaan guru merupakan fungsi manajemen pengembangan sumberdaya manusia yang harus dilaksanakan melalui strategi dan pendekatan-pendekatan tertentu.
2. Guru sebagai sumberdaya pendidikan di sekolah harus menguasai pengetahuan, dan pemahaman akademik, memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya, dan

mampu melaksanakan kegiatan penunjang tugas utama. Oleh karena itu, manajemen pengembangan sumber daya manusia harus diorientasikan pada mutu yang dimulai sejak penentu penentuan kebutuhan guru, rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, pembinaan, serta pengembangannya.

3. Guru merupakan ujung tombak pelaksanaan proses pembelajaran serta perkembangan dan kemajuan pendidikan, maka dibutuhkan guru yang profesional yang mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta bertanggung jawab terhadap disiplin ilmunya, memiliki kemampuan berinteraksi dengan siswa secara profesional, menghormati dan melindungi hak-hak siswa, menjadi teladan dan sikap dan pemikiran, memberikan informasi yang luas dan mutakhir, menciptakan suasana akademik yang kondusif, serta mampu melaksanakan evaluasi yang obyektif dan berkesinambungan.
4. Iklim organisasi yang kondusif memegang peran penting dalam mendorong transformasi kompetensi intelektual individu menjadi modal intelektual organisasi. Lingkungan belajar yang kondusif dimulai dari pimpinan yang demokratis, disiplin kerja, menjunjung nilai-nilai budaya organisasi, tersedianya sarana dan prasarana belajar, kesemuanya itu dapat mendukung terjadinya proses pembelajaran terus menerus.

#### 4.4.3 Langkah – Langkah Implementasi Model

Keberhasilan pelaksanaan model perlu didukung oleh langkah-langkah yang harus ditempuh agar penempatan guru yang mengajar di kelas bina lingkungan efektif, efisien dan produktif Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelatihan yang berorientasi pada hasil analisis kebutuhan. Rencana pelatihan ini meliputi, rencana penetapan peserta

- pelatihan, rencana penetapan instruktur dan nara sumber, rencana waktu dan sumber daya pelatihan termasuk anggaran, rencana tentang kurikulum dan silabus, dan rencana tentang media dan alat pendukung lainnya.
2. Menyusun panduan teknis pelaksanaan pelatihan guru oleh pelaksana pelatihan. Panduan ini berisi informasi tentang latar belakang pelatihan, tujuan pelatihan, manfaat pelatihan, waktu dan tempat pelatihan, instruktur dan nara sumber, peserta pelatihan, alur dan mekanisme pelatihan, materi dan jadwal pelatihan, output yang diharapkan, dan pembiayaan pelatihan.
  3. Melakukan tes kinerja kepada seluruh peserta sebelum dilakukan pembelajaran melalui pre-tes. Tes kinerja ini berisi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap peserta terhadap materi-materi pelatihan.
  4. Melaksanakan pelatihan guru berdasarkan panduan teknis yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan dengan mekanisme pembelajaran berbasis kebutuhan, *Focus Group Discussion* (FGD), Pembelajaran kooperatif, Seminar dan Workshop.
  5. Melakukan tes kinerja kepada seluruh peserta setelah dilakukan pembelajaran melalui postes. Tes ini meliputi pengukuran tentang pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.
  6. Melakukan pendampingan kepada seluruh peserta. Pendampingan ini dilakukan oleh tim pelaksana pelatihan pada saat para peserta melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka di kelas atau pada saat proses belajar mengajar berlangsung di kelas.
  7. Menyusun laporan akhir pelaksanaan pelatihan guru mata pelajaran oleh tim pelaksana dan tim penyelenggara pelatihan.

8. Menyerahkan laporan hasil audit dan permintaan tindakan koreksi oleh tim audit mutu kepada tim kerja penyelenggara pelatihan.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dilapangan, penelitian yang berjudul implementasi kebijakan pendidikan program bina lingkungan di SMPN 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung, yang pemaparannya disesuaikan dengan fokus penelitian meliputi : (1) sistem penerimaan peserta didik baru program bina lingkungan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung; (2) strategi penerimaan peserta didik baru program bina lingkungan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung; (3) faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program pendidikan bina lingkungan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa :

#### **5.1.1. Sistem penerimaanpeserta didikbaru program bina lingkungan di SMPN 1 Bandar Lampung**

Perencanaan pendidikan program bina lingkungan di SMPN 1 Bandar Lampung dimulai dari pendaftaran penerimaan jalur bina lingkungan yang dilakukan terlebih dahulu waktu pendaftaran dibandingkan jalur reguler dikarenakan melalui beberapa tahapan , dalam upaya menyiapkan berdirinya secara sistematis segala kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

#### **5.1.2 Sistem penerimaanpeserta didikbaru program bina lingkungan di SMPN 12 Bandar Lampung**

Perencanaan pendidikan program bina lingkungan di SMPN 12 Bandar

Lampung dimulai dari pendaftaran penerimaan jalur bina lingkungan yang dilakukan terlebih dahulu waktu pendaftaran dibandingkan jalur reguler dikarenakan melalui beberapa tahapan, dalam upaya menyiapkan berdirinya secara sistematis segala kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan melalui Perda dan Perwali Pemerintah Kota Bandar Lampung.

### **5.1.3 Strategi penerimaan peserta didik baru program bina lingkungan di SMPN 1 Bandar Lampung**

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan program bina lingkungan sudah berjalan, perencanaan program didukung oleh seluruh perangkat sekolah, yang membantu pihak sekolah untuk meningkatkan mutu dalam meningkatkan motivasi belayar peserta didik bina lingkungan. Selain itu dukungan juga datang dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan adanya peran serta orang tua, komite untuk membantu terlaksananya program bina lingkungan ini sebaik baiknya.

Pelaksanaan program sudah dilaksanakan berdasarkan apa yang telah direncanakan, dikarenakan peserta didik yang mendaftar telah melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan masing-masing sehingga sekolah menerima seluruh peserta didik melalui jalur bina lingkungan.

### **5.1.4 Strategi penerimaan peserta didik baru program bina lingkungan di SMPN 12 Bandar Lampung**

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan program bina lingkungan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun belum memberikan solusi dalam meningkatkan mutu sekolah terutama dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik bina lingkungan. Selanjutnya pelaksanaannya baik ditinjau dari kurikulum yang digunakan, perekrutan peserta didik, tenaga didik, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti

membuat perangkat pembelajaran, analisis mata pelajaran; analisis kompetensi dasar, pemetaan kompetensi dasar, materi pengayaan, alokasi waktu dan metode yang digunakan dan desain lembar kerja untuk pencapaian kompetensi sudah tersusun belum tersusun dengan baik, Untuk itu diperlukan langkah strategis dari sekolah untuk mengatasi persoalan tersebut.

### **5.1.5 Faktor Penghambat dan pendukung dalam Pelaksanaan program bina lingkungan di SMPN 1 Bandar Lampung**

Faktor hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program kelas bina lingkungan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung adalah : pada saat pendaftaran pada pendidik, syarat keterangan tidak mampu dimiliki oleh semua calon pendaftar dari jalur bina lingkungan belum ada kriteria standar dan hal ini menyebabkan sekolah kurang dapat menyeleksi secara objektif karena syarat telah terpenuhi.

Pada anak didik : sulitnya adaptasi terhadap lingkungan membuat peserta didik bina lingkungan kesulitan menyesuaikan diri dengan peserta didik dari jalur umum dan reguler yang masuk ke sekolah biasa bersaing dalam memperoleh nilai, hal ini dirasakan oleh guru bidang studi yang mengajar di kelas bina lingkungan. Masih kurangnya minat belajar dan keinginan peserta didik bina lingkungan dalam menerima materi yang diberikan guru mata pelajaran di kelas kadangkala menyulitkan guru yang mengajar di kelas. Dibutuhkan kesabaran saat menyampaikan materi ajar dan mengubah cara menyampaikan bahan ajar menjadi suatu keharusan bagi guru, hal ini menjadi penting dilakukan agar peserta didik bina lingkungan dapat lebih menyerap materi pelajaran dan meningkatkan semangat belajar.

Komunikasi yang baik dan hubungan emosional yang erat antara guru dan peserta didik harus lebih dibangun, guru di SMP N 1 Bandar Lampung selalu

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di kelas yang di dalamnya di dominasi oleh peserta didik bina lingkungan, lebih menekankan pada sikap guru yang mampu menjaga dan meningkatkan komunikasi serta hubungan emosional yang erat dengan peserta didik bina lingkungan diperlukan agar peserta didik bina lingkungan dapat menyesuaikan diri dengan peserta didik dari jalur reguler dan jalur prestasi.

#### **5.1.6 Faktor pendukung dan hambatan dalam Pelaksanaan program bina lingkungan SMPN 12 Bandar Lampung**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program bina lingkungan, antara lain koordinasi antara guru mata pelajaran dengan wali kelas dan guru bimbingan konseling berjalan dengan baik sehingga permasalahan yang seringkali timbul dalam kelas dapat ditangani. Faktor hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program kelas bina lingkungan di SMP Negeri 12 Bandar Lampung adalah : pada saat pendaftaran pada pendidik, syarat keterangan tidak mampu dimiliki oleh semua calon pendaftar dari jalur bina lingkungan belum ada kriteria standar dan hal ini menyebabkan sekolah kurang dapat menyeleksi secara objektif karena syarat telah terpenuhi.

Pada anak didik : sulitnya adaptasi terhadap lingkungan membuat peserta didik bina lingkungan kesulitan menyesuaikan diri dengan peserta didik dari jalur umum dan reguler yang masuk ke sekolah biasa bersaing dalam memperoleh nilai, hal ini dirasakan oleh guru bidang studi yang mengajar di kelas bina lingkungan. Masih kurangnya minat belajar dan keinginan peserta didik bina lingkungan dalam menerima materi yang diberikan guru mata pelajaran di kelas kadangkala menyulitkan guru yang mengajar di kelas. Dibutuhkan kesabaran saat menyampaikan materi ajar dan mengubah cara menyampaikan bahan ajar menjadi suatu keharusan bagi guru, agar

peserta didik bina lingkungan dapat lebih menyerap materi pelajaran dan meningkatkan semangat belajar.

Komunikasi yang baik dan hubungan emosional yang erat antara guru dan peserta didik harus lebih dibangun, selalu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di kelas yang di dalamnya di dominasi oleh peserta didik bina lingkungan, lebih menekankan pada sikap guru yang mampu menjaga dan meningkatkan komunikasi serta hubungan emosional yang erat dengan peserta didik bina lingkungan diperlukan agar peserta didik bina lingkungan dapat menyesuaikan diri dengan siswa dari jalur reguler dan jalur prestasi.

#### **5.2 Implikasi**

Program pendidikan bina lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung berhasil memperluas akses pendidikan di sekolah negeri, perlu dikaji lebih lanjut kaitan kebijakan pemerataan pendidikan dengan mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung.

#### **5.3 Saran**

##### **5.3.1 Bagi Sekolah**

Berkaitan dengan perencanaan program bina lingkungan perlu ditingkatkan lagi agar perencanaan menjadi lebih terprogram, dan perencanaan program ini mendapatkan perhatian dari pihak Dinas Pendidikan agar nantinya pada pelaksanaan tidak terjadi kesalahan, salah satunya syarat kriteria calon peserta didik bina lingkungan yang dapat diterima di sekolah.

Pelaksanaan program bina lingkungan sebagai bentuk pelayanan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu hendaknya dikelola secara lebih efektif terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mencari konsep strategi mulai dari tes, penempatan guru yang mengajar di kelas bina lingkungan dan koordinasi dan komunikasi yang baik bersama komite sekolah menjadi suatu keharusan agar

komite sekolah dapat membantu sekolah dalam mengembangkan sekolah, dan menjalankan fungsinya sebagai pemberi pertimbangan, pengontrol program, mediator antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik atau masyarakat, pemerintah dan *stakeholders* lain.

### 5.3.2 Bagi Pemerintah Daerah

Kriteria peserta didik dari keluarga kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan harus lebih selektif, sehingga sekolah tidak lagi dipusingkan masalah mampu atau kurang mampu calon peserta didik tersebut dan memiliki kemauan dan kemampuan sehingga lebih terkonsep dan tetap sasaran, ada badan khusus yang dibentuk Pemerintah Kota Bandar Lampung yang independen dan dilakukan oleh profesional yang berintegritas dan bertanggung jawab selain data dari Ketua RT setempat, sehingga dapat mendata dan merekomendasikan peserta didik keluarga kurang mampu sesuai dengan kondisi riil calon peserta didik., disamping itu dengan dukungan pemerintah Kota Bandar Lampung peserta didik bina lingkungan bisa lebih mengembangkan kemampuannya dengan lengkapnya fasilitas-fasilitas pendukung seperti penambahan ruang belajar seiring dengan bertambahnya jumlah kuota penerimaan calon peserta didik sehingga peserta didik nyaman ketika belajar dikelas.

### 5.3.3 Bagi Guru

Konsep mengajar melayani dengan hati adalah salah satu strategi yang dapat ditanamkan pihak sekolah kepada seluruh guru yang ada di sekolah. Sebagai pendidik dari peserta didik bina lingkungan yang mayoritas motivasi belajar rendah, selayaknya semua tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah melakukan proses pembelajaran dengan sabar dan berstandar kelayakan, menempatkan guru yang berkualitas

ditempatkan di kelas bina lingkungan dapat menjadi strategi sekolah agar dapat mengejar ketertinggalan hasil belajar. Program bina lingkungan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang harus diterima sekolah negeri di Kota Bandar Lampung sebagai upaya memperluas akses pendidikan terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu sehingga guru harus memperbaiki kualitas personal (kompetensi, profesionalitas, efektivitas maupun *leadership*), kualifikasi pendidikan serta relevansi pendidikannya agar dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan di dan membantu sekolah dalam mempertahankan mutu sekolah negeri di Kota Bandar Lampung.

Aktivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah perlu mempertimbangkan teori pembelajaran yang dapat membuat proses belajar tidak lagi merupakan suatu yang menakutkan. Tetapi dapat menjadi syarat untuk mewujudkan perilaku yang kreatif dan perasaan bebas, karena orang yang berfikir bebas pada umumnya akan mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan sebagai langkah untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah.

### 5.3.4 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat pemerhati dan peneliti dunia pendidikan dapat memberikan masukan dan saran tentang program bina lingkungan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan perluasan akses pendidikan di Kota Bandar Lampung agar kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung tepat guna dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas : Jakarta  
Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.

- Gajahmada University Press :  
Yogyakarta.
- J. Salusu, 2003. *Pengambilan keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Rasindo : Jakarta
- Johnston, W.B&Packer  
,A.E.1987. *Workforce 2000 : Work and Workers for the twenty-First Century*. Diane Publising : Hudson Institute, Indianapolis, Indiana
- Mulyasa, E.2006. *Menjadi kepala sekolah profesional*, PT. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Nugroho, D. Riant, 2000. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*. PT Elex Media Computindo : Jakarta.
- Perda Kota Bandar Lampung Tahun 2012*  
*Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013*
- Pongtuluran, Aris, 1995. *Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. LPMP : Jakarta
- Rabin *et.al*, 2000. *Handbook Of Strategik Manajement*. New York
- Rahman, B , 2010. *Manajemen Mutu Akademik Untuk meningkatkan Produktivitas Kelembagaan* (Disertasi). Universitas Pendidikan Indonesia : Bandung
- Rahman, B.2013. *Manajemen Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan : Teori dan Praktek Melejitkan Produktivitas*. Graha Ilmu.Yogyakarta
- Sihombing, Umberto dan Indarjo, 2003. *Pembiayaan Pendidikan*. ISBN
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2009. *Manajemen Pendidikan*. Alfabeta Bandung